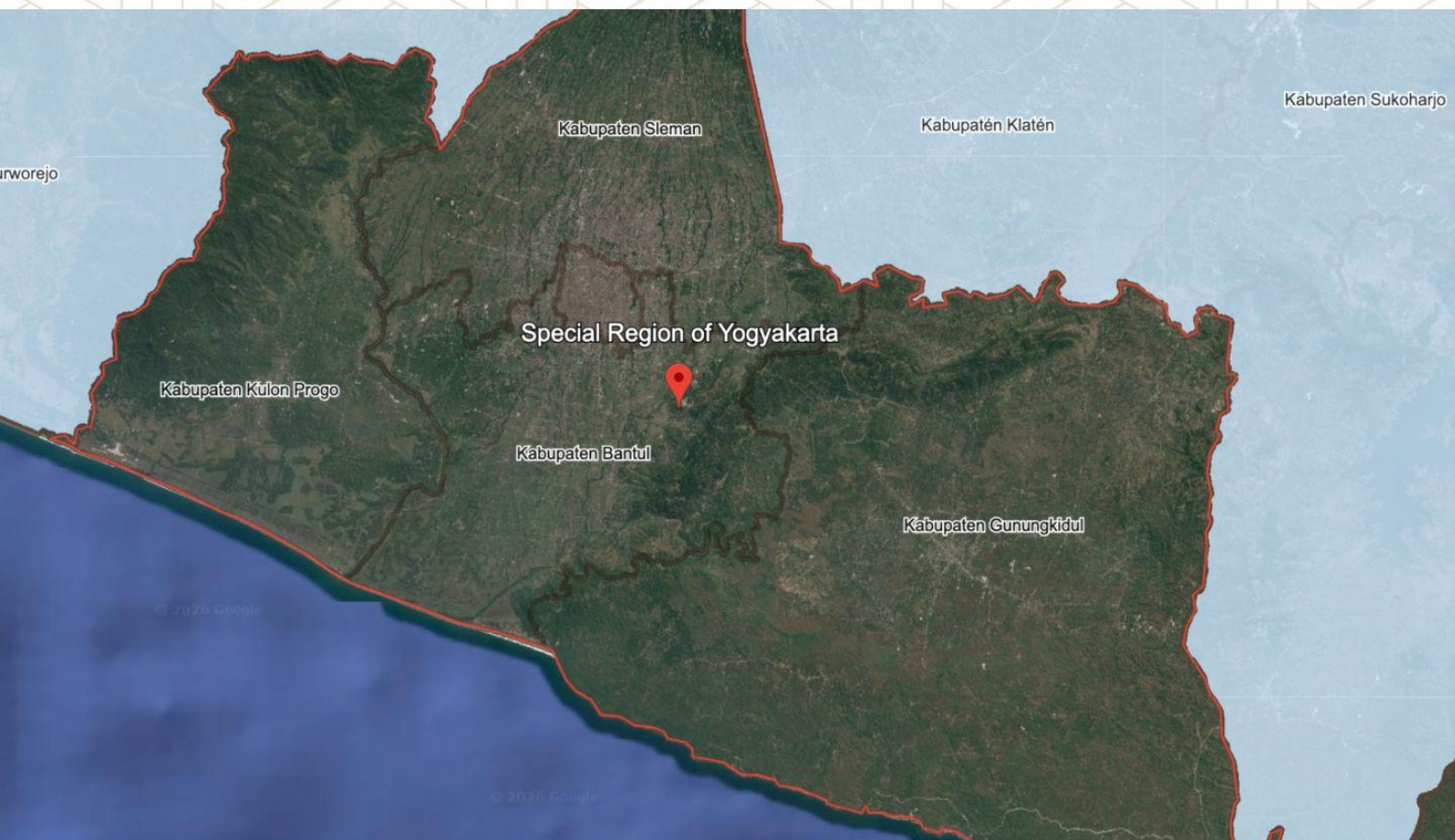


Membangun Ruang Gerak Kolektif Organisasi Masyarakat Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta

*Catatan Penilaian Situasi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik Provinsi DIY
2025*



Civic Engagement Alliance
2025



Potret Demografi, Ekonomi, dan Daya Dukung Ekologis¹

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi terkecil di Indonesia dengan luas 3.185 km², namun memiliki peran strategis yang jauh melampaui ukuran wilayahnya. Pada 2023, DIY dihuni oleh sekitar 3,77 juta jiwa dengan kepadatan rata-rata 1.183 jiwa/km² – terpadat di kawasan lereng Merapi dan dataran rendah yang meliputi Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul, serta paling jarang di kawasan karst Gunungkidul.

Kualitas sumber daya manusia DIY termasuk yang terbaik secara nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY tercatat 80,22 pada 2023, menempatkannya di peringkat kedua nasional setelah DKI Jakarta. Angka harapan hidup mencapai 74,8 tahun, dan rata-rata lama sekolah 9,75 tahun – jauh di atas rata-rata nasional. Keunggulan ini tidak lepas dari status DIY sebagai kota pendidikan, dengan lebih dari 100 perguruan tinggi dan lebih dari 350.000 mahasiswa aktif yang setiap tahunnya mengalir dari seluruh penjuru Indonesia. Meski demikian, terdapat paradoks yang mencolok: angka kemiskinan DIY berada di angka 11,49%, masih di atas rata-rata nasional 9,36%. Ketimpangan ini mencerminkan kesenjangan antar kesejahteraan dan tingkat daya tarik pariwisata yang dibanggakan. Bahkan di tahun 2024, DIY disebut sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa.²

Dari sisi ekonomi, PDRB DIY pada 2023 diperkirakan mencapai sekitar Rp 162 triliun dengan laju pertumbuhan 4,9%. Perekonomian DIY ditopang oleh tiga sektor utama yang saling berkaitan. Pertama, pariwisata dengan lebih dari 8 juta kunjungan wisatawan per tahun ke destinasi seperti Malioboro, Keraton Yogyakarta, Candi Prambanan, dan kawasan pantai selatan. Pariwisata menjadi penggerak utama sektor akomodasi, kuliner, dan perdagangan. Kedua, pendidikan tinggi yang menciptakan permintaan domestik yang stabil melalui konsumsi mahasiswa dan operasional institusi. Ketiga, industri kreatif dan UMKM yang menjadi identitas sekaligus tulang punggung sebagian perekonomian rakyat, seperti khususnya batik tulis Yogyakarta, kerajinan perak Kotagede, dan kesenian tradisional. Lebih dari 95% unit usaha di DIY berskala mikro dan kecil, dengan sekitar 60% angkatan kerja terserap di sektor informal. Ketergantungan yang tinggi pada pariwisata menjadi titik lemah ketika terjadi guncangan eksternal seperti bencana alam atau pandemi mampu melemahkan perekonomian daerah secara signifikan dalam waktu singkat.

¹ Sebagian informasi bersumber: BPS DIY, BAPPEDA DIY, dan KLHK (2022-2023)

² Yefta Christopher Asia Sanjaya, "DIY Jadi Provinsi Paling Miskin di Jawa pada 2024, Apa Penyebabnya?," Kompas.com, 5 Juli 2024,

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/05/143000265/diy-jadi-provinsi-paling-miskin-di-jawa-pada-2024-apa-penyebabnya?page=all> (diakses 19 Mei 2026).

Yogyakarta saat ini menghadapi tumpang tindih persoalan sosial-ekologis yang semakin kompleks, dengan isu lingkungan menjadi persoalan paling dominan dan tersebar luas di hampir seluruh wilayah DIY. Dari Gunungkidul hingga Kulon Progo, ancaman tambang, alih fungsi lahan, ekspansi pariwisata, krisis iklim, hingga kerusakan kawasan karst dan pesisir memperlihatkan tekanan besar terhadap ruang hidup masyarakat. Di Gunungkidul misalnya, konflik ruang hidup muncul melalui ancaman penggusuran Pantai Sanglen untuk pembangunan resort, ekspansi JJLS, serta dampak industri semen dan PLTU Pacitan terhadap ekosistem kawasan karst. Sementara di Bantul dan Kota Yogyakarta, isu persampahan, pembangunan PSEL Piyungan, hak konsumen, hingga pengelolaan kawasan urban menjadi persoalan yang saling berkaitan dengan pertumbuhan kota dan tekanan ekologis. Kulon Progo menghadapi dampak pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional, tambang, dan tekanan industri di wilayah perbatasan, sedangkan Sleman menjadi arena berbagai isu seperti jalan tol, ekstraktivisme, kriminalisasi aktivis, kebebasan akademik, hingga alih fungsi lahan. Di tengah situasi tersebut, isu inklusivitas seperti hak kelompok minoritas gender, perempuan, lansia, dan disabilitas juga terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah penyangga urban. Pembacaan kolektif OMS menunjukkan bahwa masifnya pariwisata dan pembangunan berbasis investasi telah mendorong perubahan tata ruang sekaligus memperbesar potensi bencana dan konflik sosial. Pada saat yang sama, konsolidasi gerakan masyarakat sipil masih cenderung terpusat di sumbu utara-selatan Sleman-Kota Yogyakarta-Bantul, sementara wilayah pinggiran justru mengalami perluasan kasus-kasus lingkungan dan sosial yang semakin intens.

Penilaian Partisipatif Kondisi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik

Penilaian kondisi ruang sipil dan keterlibatan publik yang dilakukan menggunakan instrumen CIVICA yang dikembangkan oleh Civic Engagement Alliance (CEA) Indonesia untuk membaca, memahami, dan merefleksikan ruang sipil dan ruang pelibatan masyarakat sipil berbasis dinamika dan konteks pada masing-masing wilayah di Indonesia secara partisipatif dan mandiri. Instrumen ini dirancang untuk menghadirkan proses belajar, perubahan, dan kolaborasi yang tumbuh di tingkat lokal dan regional.

Melalui dua arena/blok utama yaitu Civic Space dan Civic Engagement, CIVICA membantu masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan jejaring mitra memahami tiga aspek utama, yaitu, bagaimana ruang sipil terbuka dan dimanfaatkan, bagaimana masyarakat sipil memperkuat keterlibatan publik dan bagaimana konektivitas antaraktor dan antarwilayah berkontribusi pada keberlanjutan gerakan.

Refleksi Ruang Sipil & Keterlibatan Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat sipil (OMS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan konsolidasi gerakan di sekretariat Civic Engagement Alliance (CEA), Yogyakarta. Organisasi masyarakat sipil yang diundang dalam pertemuan ini sebanyak 22 organisasi, namun yang bisa hadir hanya 8 organisasi, diantaranya: Arkom Indonesia, Walhi Yogyakarta, LSJFH, Pondok Pesantren Waria Yogyakarta, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), Climate Ranger Jogjakarta (CRJ), LBH Yogyakarta, dan LBH Semarang. Pertemuan ini juga diikuti oleh jaringan CEA Kalimantan, yaitu ELPAGAR dari Kalimantan Barat dan Yayasan Pionir Bulungan dari Kalimantan Utara.

Pertemuan dibuka dengan sebuah pengantar bahwa situasi ruang gerak masyarakat sipil saat ini sedang menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Proses ini diawali dengan pengenalan sekaligus membaca konteks isu di Yogyakarta dan sekitarnya. Berdasarkan pembacaan tersebut, ditemukan bahwa isu lingkungan menjadi isu yang paling dominan dan tersebar di berbagai wilayah di Yogyakarta. Meskipun begitu, isu lingkungan juga semakin meluas ke wilayah pinggiran dan daerah penyangga. Sementara itu, berbagai isu sosial lainnya banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan, terutama Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul.



Gambar 1. Pemetaan Isu dan Sebaran Wilayah OMS

Isu-isu di Yogyakarta erat dengan perkembangan pariwisata di Yogyakarta dan sekitarnya, termasuk sebagian Jawa Tengah yang berbatasan dengan DIY. Semakin masifnya pariwisata dinilai berdampak pada tata ruang dan meningkatkan potensi bencana, yang kemudian memicu bertambahnya persoalan sosial di masyarakat. Di sisi lain, konsolidasi gerakan masyarakat sipil masih cenderung terpusat pada wilayah utara-selatan dalam sumbu imajiner Yogyakarta, yaitu Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul.

Dimensi Pengorganisasian Basis atau Komunitas

Pengorganisasian masyarakat sipil di Yogyakarta terus berlangsung di tengah stigma yang melekat terhadap OMS sebagai antek asing, provokator, kelompok anarko, hingga pihak luar yang dianggap mengganggu “kedamaian” Yogyakarta. Untuk merespons situasi tersebut, berbagai organisasi mengembangkan pendekatan yang lebih membumi melalui pendidikan politik, penguatan kapasitas komunitas, pengorganisasian berbasis kawasan, pendekatan ekonomi, hingga strategi kultural yang menyesuaikan konteks sosial masyarakat. Praktik-praktik tersebut tampak dalam penguatan jaringan kampung untuk isu hunian, pengelolaan sampah dan energi mandiri, pengembangan credit union komunitas transpuan, advokasi hak konsumen, hingga pendampingan masyarakat terdampak konflik agraria dan investasi. Di tingkat komunitas, mulai tumbuh berbagai bentuk ketahanan kolektif seperti koperasi jasa, usaha bersama, dana solidaritas warga, pengawasan lingkungan berbasis komunitas, pengembangan ekonomi berkelanjutan, serta penguatan perlindungan sosial melalui pendekatan desa dan kelompok-kelompok lokal. Solidaritas lintas isu juga mulai dibangun, terutama melalui konektivitas antara isu hunian, lingkungan, pesisir, dan rakyat miskin kota, meskipun jejaring tersebut masih terbatas dan belum sepenuhnya terhubung secara interseksional dengan spektrum masyarakat sipil yang lebih luas. Dalam praktiknya, keberlanjutan pengorganisasian masih menghadapi tantangan serius berupa tingginya ketergantungan komunitas terhadap organisasi pendamping, lemahnya regenerasi kepemimpinan, mobilitas aktor penggerak, belum adanya pola baku untuk membangun kemandirian komunitas, serta tekanan kebutuhan ekonomi warga yang sering kali lebih mendesak. Meski beberapa komunitas seperti credit union transpuan mampu tetap hidup secara mandiri pasca pendampingan, secara umum gerakan masyarakat sipil di Yogyakarta masih membutuhkan penguatan konektivitas lintas isu, perluasan dukungan sosial di luar sesama OMS, serta pengembangan pendekatan bersama yang lebih efektif untuk membangun keberlanjutan komunitas secara kolektif dan jangka panjang.

Rekomendasi Prioritas

Menemukan kembali pendekatan-pendekatan pengorganisasian basis/komunitas yang mampu merespon situasi/konteks yang berubah dan terhubung secara interseksionalitas dalam ekosistem Masyarakat sipil.

Dimensi Kapasitas Masyarakat Sipil

Kapasitas masyarakat sipil di Yogyakarta menunjukkan adanya fondasi pengetahuan dan keterampilan advokasi yang cukup kuat, terutama dalam isu lingkungan, inklusivitas, tata

ruang, hingga perlindungan komunitas. Berbagai organisasi telah membangun praktik pengelolaan pengetahuan melalui riset bersama, forum belajar, dan pengorganisasian berbasis kawasan, seperti kolaborasi WALHI, Arkom, PolGov, dan Sekolah Politik dalam advokasi krisis air di Yogyakarta, pembentukan kelompok kerja berbasis wilayah ekologis, hingga pengembangan platform belajar seperti Akademi Arsitektur Komunitas oleh Arkom. Isu lingkungan bahkan menjadi benang merah yang menjahit pertukaran pengetahuan lintas gerakan. Namun demikian, sistem pengelolaan pengetahuan masih berjalan secara parsial, sektoral, dan banyak bergantung pada pengetahuan tidak tertulis (tacit knowledge) yang belum terdokumentasi secara sistematis. Dalam aspek safeguarding, sejumlah organisasi telah memiliki SOP terkait GEDSI, perlindungan data, advokasi, hingga modul PSEAH, sementara komunitas seperti pesantren transpuan juga mengembangkan praktik perlindungan berbasis pengalaman komunitas. Meski demikian, berbagai kebijakan dan standar perlindungan tersebut sebagian besar masih dipandang sebagai kebutuhan administratif donor dan belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi budaya organisasi. Dalam kerja advokasi, OMS di Yogyakarta juga telah mengembangkan pendekatan berbasis data melalui kampanye publik, baseline partisipatif hingga tingkat keluarga, pelibatan masyarakat untuk membaca dampak pembangunan, serta penggunaan strategi litigasi dan non-litigasi dalam memperjuangkan hak-hak warga. Sayangnya, data dan kapasitas advokasi yang dimiliki berbagai organisasi masih tersebar dan belum terolah menjadi kekuatan kolektif yang mampu menopang gerakan bersama secara lebih strategis. Selain itu, terdapat kesenjangan pengetahuan dan keterampilan advokasi lintas generasi yang membuat pengalaman serta kapasitas organisasi belum sepenuhnya menjadi pijakan utama dalam membangun peran-peran strategis gerakan masyarakat sipil secara kolektif.

Rekomendasi Prioritas

Mengaktifkan ruang/kanal pengetahuan bersama (sebagai saluran untuk menghimpun dan menjaga sirkulasi pengetahuan bersama dalam ekosistem Masyarakat sipil DIY

Dimensi Konektivitas Mobilisasi Sumberdaya

OMS di Yogyakarta terhubung dengan berbagai jaringan nasional, regional, dan konsorsium berbasis isu, seperti gerakan lingkungan, anti diskriminasi, hingga jaringan arsitek sosial. Namun demikian, konektivitas antar OMS masih menghadapi tantangan dalam menjembatani perbedaan generasi, cara komunikasi, perspektif isu, serta kesenjangan akses informasi dan teknologi. Dalam pengelolaan pengetahuan dan kepakaran, beberapa organisasi mulai membangun database dan jejaring ahli berbasis isu, seperti WALHI yang

melibatkan akademisi di Yogyakarta dalam penguatan isu persampahan serta pengembangan database arsitek berperspektif sosio-humanis oleh Arkom. Di sisi lain, pada isu tertentu seperti komunitas transpuan, informasi dan jaringan kontak masih belum terdokumentasi dengan baik sehingga pengelolaan informasi masih banyak bergantung pada relasi personal. Upaya komunikasi nasional dan regional juga terus dilakukan melalui penyesuaian metode komunikasi, pelatihan lingkungan, dan ruang berbagi pengetahuan, meskipun masih terkendala oleh kesenjangan teknologi dan perbedaan perspektif antargenerasi. Secara umum, konektivitas antar masyarakat sipil di Yogyakarta belum terbangun secara kuat. Banyak forum masih bersifat formalitas dan belum berfungsi strategis sebagai ruang kolaborasi, sementara ruang kreatif dan inovatif yang tersedia juga belum dimanfaatkan secara optimal. Situasi ini menunjukkan pentingnya membangun budaya belajar bersama lintas generasi dengan memanfaatkan forum dan ruang kreatif yang ada untuk memperkuat hubungan antar jejaring masyarakat sipil.

Rekomendasi Prioritas

1. Membangun/ mengembangka budaya belajar dengan mengoptimalkan forum-forum/ruang kreatif yang sudah ada.
2. Konektor jaringan dengan adanya kelompok/tim/perorangan yang mengambil peran sebagai konektor/komunikator.

Dimensi Mobilisasi Sumberdaya

Praktik mobilisasi sumber daya OMS di Yogyakarta dilakukan melalui berbagai bentuk penggalangan dana kolaboratif, solidaritas komunitas, usaha sosial, serta kerja sama dengan donor dan pemerintah. Inisiatif tersebut muncul melalui iuran anggota koalisi, dana bersama berbasis event, pengelolaan dapur umum saat pandemi, hingga pengembangan dana kolektif dan skema dana bergulir komunitas. Sejumlah organisasi juga mulai mengembangkan diversifikasi sumber daya melalui pasar sehat inklusif, usaha bersama berbasis edu-tourism, koperasi renovasi dan konstruksi, serta ruang promosi produk komunitas sebagai bagian dari model fundraising organisasi. Dalam relasi dengan donor, pengalaman OMS cukup beragam, mulai dari ruang negosiasi yang relatif setara hingga keterbatasan posisi tawar terkait biaya operasional, administrasi, dan pencairan anggaran. Untuk memperkuat posisi tersebut, beberapa organisasi membangun konsorsium dan berbagi peran antar lembaga. Meski praktik mobilisasi sumber daya telah berjalan dan cukup beragam, upaya tersebut belum sepenuhnya berkelanjutan dan masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan pendanaan, kapasitas organisasi, serta ketegangan antara prinsip gerakan sosial dan logika bisnis atau pasar.

Rekomendasi Prioritas

1. Mendorong pengelolaan mobilisasi sumberdaya dan mengembangkan simpul pemasaran melalui Walhi DIY.
2. Memetakan gerakan untuk membangun bisnis social berkelanjutan, cth: sukacita textile
3. Aktivasi gerakan ekonomi kreatif
4. Merawat keberlanjutan dalam mobilisasi sumber daya, join proposal

Dimensi Regulasi Pendukung

Kondisi regulasi di Yogyakarta menunjukkan situasi yang kompleks bagi masyarakat sipil karena terdapat kebijakan yang mendukung perlindungan hak warga dan kerja-kerja OMS, seperti UU KIP, UU Bantuan Hukum, UU TPKS, Anti-SLAPP, hingga Perda HIV/AIDS, namun di saat yang sama terdapat regulasi yang dinilai membatasi ruang gerak masyarakat sipil, seperti UU dan Perda Keistimewaan, Perda Gepeng, pembatasan kebebasan berpendapat, regulasi pertanahan DIY, serta KUHP dan KUHP baru. Dalam situasi tersebut, masyarakat sipil tetap terlibat dalam penyusunan kebijakan melalui forum konsultasi, musrenbang, advokasi komunitas, dan pemetaan partisipatif, serta berhasil mendorong sejumlah perubahan seperti model perumahan sosial, penolakan Perda Gepeng, penolakan PSN Bandara Kulon Progo, advokasi tata ruang, moratorium pertambangan di DAS Progo, dan kebijakan pengarusutamaan gender. Namun, aksi kolektif untuk menghadang regulasi yang dianggap menghambat di tingkat lokal masih menghadapi tantangan sosial, budaya, dan politik, terutama terkait kuatnya posisi keistimewaan DIY dan kepentingan elit.

Rekomendasi Prioritas

1. Memilih strategi dan pendekatan advokasi sesuai dengan karakter sosial dan budaya Masyarakat.
2. Mencari metode dan ruang-ruang pertarungan wacana dan gagasan hingga memilih narasi yang kritis terhadap status keistimewaan.

Dimensi Konsolidasi dan Narasi Advokasi

Konsolidasi gerakan masyarakat sipil di Yogyakarta dibangun melalui berbagai isu dan ruang bersama yang memungkinkan keterlibatan lintas elemen, termasuk akademisi, komunitas dampingan, dan kelompok masyarakat lainnya. Isu sampah menjadi salah satu titik temu yang menghubungkan berbagai elemen gerakan melalui pengalaman dan keresahan bersama, sementara perubahan iklim mulai diposisikan sebagai agenda kolektif untuk membangun gerakan bersama. Inisiatif terkait pangan sehat juga mulai

dikembangkan dengan melibatkan pemerintah, kampus, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam praktik advokasi, penggunaan narasi berbasis budaya lokal dan pengalaman masyarakat menjadi pendekatan yang digunakan untuk mendekatkan isu kepada warga, seperti gerakan “Jogja Ora Didol” yang menggunakan bahasa lokal serta advokasi “Merti Kali” yang berangkat dari budaya masyarakat pesisir sungai. Narasi sejarah dan simbol budaya juga digunakan dalam membangun pesan advokasi dan keselamatan bersama. Pada aspek GEDSI, ruang partisipasi publik mulai terbuka bagi kelompok transpuan untuk belajar dan mengekspresikan diri, disertai keterbukaan akses dengan berbagai lembaga lain. Infrastruktur ramah disabilitas juga mulai berkembang, meskipun perlakuan terhadap kelompok disabilitas mental masih menghadapi diskriminasi dan sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas tuli dinilai belum direspons secara adil. Dalam beberapa situasi, organisasi masyarakat sipil juga terlibat dalam asesmen, fasilitasi korban, serta layanan kesehatan bagi kelompok lansia. Secara umum, konsolidasi antar jaringan di Yogyakarta telah terjalin dan menunjukkan adanya interseksionalitas antar isu, namun gerakan bersama yang terbentuk masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan identitas serta penguatan bersama antar organisasi masyarakat sipil.

Rekomendasi Prioritas

1. Pertemuan rutin untuk sharing praktik baik yang bisa menjadi replikasi gerakan dan update aktifitas masing-masing lembaga
2. Memunculkan narasi gerakan advokasi yang disepakati bersama dan menguatkan bahwa jaringan punya kapasitas terhadap andir dan peran dalam advokasi tersebut.
3. Adanya komunikator untuk mempererat komunikasi dan koordinasi gerakan
4. Komitmen lembaga untuk bergerak bersama.

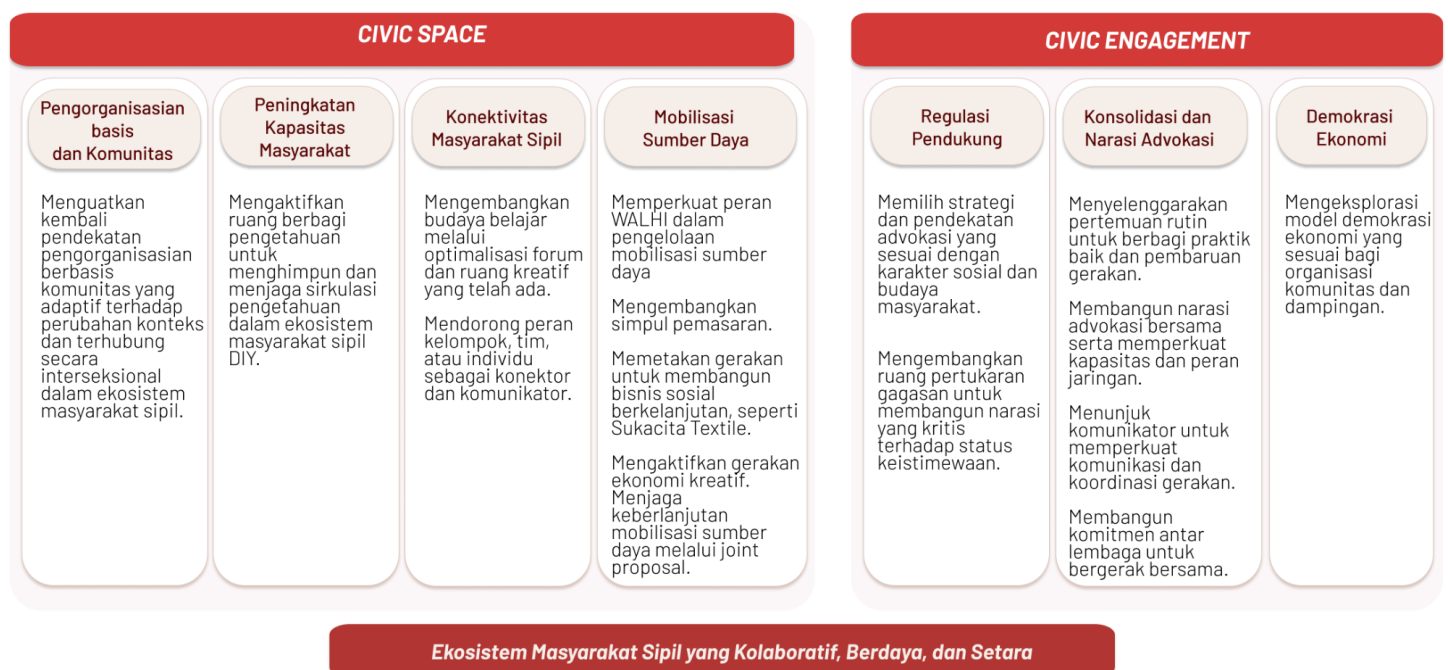
Dimensi Demokrasi Ekonomi

Praktik demokrasi ekonomi berbasis komunitas di Yogyakarta mulai berkembang melalui berbagai inisiatif kolektif seperti koperasi komunitas transpuan, usaha pengrajin dampingan LKY, arisan renovasi rumah dan dana komunitas ARKOM, pengelolaan koperasi, hingga pengembangan usaha jamu gendong. Penguatan ekonomi tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga menjadi strategi menjaga keberlanjutan organisasi dan memperluas akses pasar. Secara umum, masyarakat sipil di Yogyakarta memiliki modal gerakan yang cukup kuat melalui pengalaman advokasi, pengorganisasian komunitas, jejaring, dan inisiatif ekonomi berbasis komunitas. Namun, berbagai praktik tersebut masih berjalan parsial dan belum sepenuhnya terhubung menjadi

kekuatan kolektif lintas organisasi, wilayah, dan isu. Di sisi lain, masyarakat sipil masih menghadapi tantangan berupa tingginya ketergantungan komunitas terhadap organisasi pendamping, lemahnya konektivitas antar jejaring, kesenjangan pengetahuan lintas generasi, serta keterbatasan pengelolaan sumber daya dan data bersama, sehingga muncul kebutuhan akan ruang temu untuk memperkuat pertukaran pengetahuan dan berbagi sumber daya antar organisasi masyarakat sipil.

Sintesis Penilaian CIVICA DIY

Sesi refleksi terhadap ruang sipil dan ruang keterlibatan menghasilkan rangkuman semua rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diterjemahkan ke dalam bentuk diagram alur sebagai berikut:



Gambar 2. Sintesis Penilaian CIVICA Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Kesimpulan

Hasil penilaian ruang sipil dan keterlibatan publik ini menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sedang menghadapi situasi yang semakin kompleks, ditandai dengan meningkatnya tekanan sosial-ekologis akibat ekspansi pariwisata, investasi, alih fungsi lahan, dan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada ruang hidup masyarakat. Di tengah situasi tersebut, organisasi masyarakat sipil (OMS) di Yogyakarta masih memiliki kapasitas pengorganisasian, advokasi, solidaritas lintas isu, dan pengembangan ekonomi komunitas yang cukup kuat, terutama dalam isu lingkungan, tata ruang, inklusivitas, dan perlindungan kelompok rentan. Namun, gerakan masyarakat sipil masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya konektivitas antar jejaring, kesenjangan pengetahuan lintas generasi, ketergantungan komunitas terhadap organisasi pendamping, serta belum terbangunnya sistem pengelolaan pengetahuan dan sumber daya bersama yang berkelanjutan. Selain itu, ruang sipil juga dibayangi berbagai regulasi dan struktur kekuasaan lokal yang dinilai membatasi ruang kritik dan partisipasi publik. Karena itu, penguatan konsolidasi gerakan, ruang belajar bersama, konektivitas lintas isu dan wilayah, serta pengembangan model keberlanjutan ekonomi gerakan menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat keberlanjutan ekosistem masyarakat sipil di Yogyakarta.